

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan bentuk kerja dan upaya pemerintah yang dilakukan untuk memperbaiki tingkat hidup dan sosial masyarakat. Pembangunan daerah juga termasuk dalam rangkaian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata di seluruh Indonesia dan tidak hanya untuk golongan masyarakat tertentu saja, serta harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat secara nyata.

Dalam era sekarang ini sebagai proses pembangunan nasional, diberlakukannya otonomi daerah seperti yang tercantum dalam UU No.32 Tahun 2004. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya sendiri. Pemerintah daerah juga bisa memaksimalkan pengolahan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dalam sistem otonomi daerah terdapat tiga prinsip menurut UU No.23 Tahun 2014 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Desentralisasi yaitu penyerahan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada bupati sebagai penanggung jawab pemerintah umum. Sedangkan tugas pembantu

yaitu pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan tugas tertentu.

Bila ada perubahan struktur yang menyangkut pembangunan wilayah suatu daerah, maka daerah memerlukan berbagai kebijaksanaan khususnya yang mengatur antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini pemerintah diharapkan untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan daerahnya masing-masing, sebab berhasil dan tidaknya pembangunan nasional tergantung pada keberhasilan pembangunan di daerah. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagi daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya adalah kemampuan daerah di dalam mengadakan atau memperoleh dana-dana atau pendapatan asli daerah sendiri.

Bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai wujud nyata otonomi daerah yaitu pemerintah daerah diberi kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya masing – masing. Pengelolaan sumber daya yang terdapat di suatu daerah dapat diolah secara maksimal dan optimal demi untuk mensejahterakan masyarakat. Ciri kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari keuangan daerah dimana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerah yakni daerah otonom harus mampu bisa menggali potensi keuangan daerahnya sendiri untuk membantu dalam pelaksanaan pemerintahan daerahnya (Aryanti, 2015).

Kemajuan dalam pengelolaan daerah otonom dapat didukung dengan cara meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah dapat bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang asli, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk merealisasikan kegiatan pembangunan yang tersebar di daerah, terdapat unsur pembiayaan yaitu tersedianya dana dalam jumlah yang memadai dan pengelolaan yang baik merupakan dasar utama bagi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan.

Sunarti (2003) menyampaikan, sejalan dengan struktur pemerintahan yang berlaku di setiap daerah di wilayah nasional terdapat tiga komponen pembiayaan pembangunan dari pemerintah :

1. Pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan program-program pembangunan di daerah tingkat I.
2. Pembiayaan pembangunan dari pemerintah daerah tingkat I yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat I untuk pembiayaan program-program pembangunan daerah tingkat I.
3. Pembiayaan pembangunan dari pemerintah daerah tingkat II yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) tingkat II untuk pembiayaan program-program pembangunan daerah tingkat II.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana yang diperoleh pemerintah diharapkan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah. Semakin banyak kegiatan yang dapat di biayai oleh pendapatan asli daerah maka jug semakin tinggi kualitas ekonomi daerah sehingga dapat mandiri sebagai daerah otonom dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

**Tabel 1.1**

Realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah

<b>No.</b>	<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah	9.916.358.232	11.696.822.243
	a. Pajak Daerah	813.117.978	10.266.079.853
	b. Retribusi Daerah	79.475.023	84.022.367
	c. Hasil Laba BUMD	291.844.276	319.188.988
	d. Lain-lain PAD yang sah	1.331.920.955	1.027.531.035
2.	Dana Perimbangan	2.542.626.745	2.694.385.621
	a. Bagi Hasil Pajak	490.753.590	832.481.79
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	168.776.726	0
	c. Dana Alokasi Umum	1.803.931.189	1.803.931.189
	d. Dana Alokasi Khusus	79.165.240	57.972.640

<b>No.</b>	<b>Jenis Pendapatan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.698.475.028	2.706.478.470
	a. Pendapatan Hibah	29.186.771	29.888.000
	b. Dana Darurat	0	0
	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1.322.069	0
	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	2.664.966.188	2.676.590.470
	e. Bantuan Keuangan dari Provinsi Lain	0	0
	f. Lainnya	3.000.000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>15.157.460.005</b>	<b>17.097.686.334</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Dari tabel diatas dapat dilihat komponen-komponen yang terdapat dalam realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan asli daerah yang terlihat meingkat dari tahun 2014 menuju ke tahun 2015 yang dipengaruhi seiring bertambahnya pajak dan retribusi daerah yang juga meningkat dari tahun sebelumnya. Kemandirian dari daerah dapat dicapai dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah seperti diatur dalam UU No.33 Tahun 2004 pasal 6.

Saleh dan Rochmansjah (2010) menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi pada saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi

hasil, sedangkan proporsi pendapatan asli daerah masih relatif kecil. Adanya dana perimbangan melalui DAU ternyata justru memberikan efek ketergantungan. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, DAU adalah transfer dari pemerintah yang bertujuan dalam pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan daerah.

Besarnya pendapatan asli daerah tergantung juga dengan berapa besarnya pendapatan daerah dari setiap kabupaten. Peran pemerintah kabupaten juga sangat berpengaruh dalam majunya perekonomian daerah dan perekonomian nasional. Maka dari itu pengoptimalan dari penarikan pajak daerah dan retribusi daerah harus dilakukan dengan bijaksana.

Berikut ini adalah data pendapatan asli daerah dari Provinsi Jawa Tengah :

**Tabel 1.2**  
Jumlah PAD Jawa Tengah

No.	Tahun	Jumlah PAD
1.	2010	4.417.869.229
2.	2011	5.088.713.212
3.	2012	6.629.308.010
4.	2013	8.212.800.640
5.	2014	9.916.358.232
6.	2015	11.696.822.243

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*

Dari data tersebut menunjukkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Jawa Tengah yang terus meningkat dari tahun ketahun dari tahun 2012 sampai dengan 2015 yaitu pada tahun 2012 sebesar

4.867.562.156 rupiah , pada tahun 2013 sebesar 6.274.773.444 rupiah, pada tahun 2014 sebesar 8.252.432.353 rupiah, dan pada tahun 2015 sebesar 9.335.166.182 rupiah.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota madya. Sebagai objek penelitian, kabupatenn di Jawa Tengah memiliki karekteristik masing – masing yang terdiri dari sektor perdagangan, sektor pariwisata serta sumber daya alam yang berbeda dan berpotensi menghasilkan pendapatan daerah yang besar serta terdapat pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang digunakan untuk membiayai program kerja pemerintah untuk membangun daerah otonom sebagai pelayanan masyarakat. Terdapat juga PDRB dan jumlah penduduk yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daaerah (PAD). Maka dari itu berdasarkan faktor–faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, penulis tertarik unutk meneliti masalah tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai penulisan karya ilmiah atau skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015”**.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada :

1. Variabel – variabel yang dianggap berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 - 2012
2. Data yang digunakam adalah data time series yaitu meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Produk Domestik Regional Bruto
- c. Jumlah Penduduk
- d. Kemiskinan

### **C. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan utama yang terjadi yaitu :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah?

### **D. Tujuan Masalah**

1. Menganalisis bagaimana pengaruh antara PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Menganalisis bagaimana pengaruh antara Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
3. Menganalisis bagaimana pengaruh antara Kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi baru bagi pembaca dan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat mengkaji topik yang sama tetapi dengan metode atau pendekatan yang berbeda.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam ilmu pengetahuan sebagai sumber data baru yang dapat dikembangkan lagi dan juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, bahan masukan dan rekomendasi untuk pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah.